

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Industrialisasi merupakan faktor kunci terjadinya banyak perubahan di Aceh pada era kolonial. Dalam rangka mempercepat pembangunan Aceh pasca Perang Aceh (1873-1912), Belanda mulai menerapkan sistem kapitalisme sebagai basis ekonomi baru melalui industrialisasi dengan harapan bisa memajukan Aceh agar sejajar dengan daerah-daerah lain di Hindia Belanda. Beberapa kota utama menjadi ujung tombak perekonomian kolonial berkat industri yang menjadi andalan di daerah itu, terutama Sabang dengan industri maritim, Kutaraja dengan pusat perdagangan dan pemerintahan, Peureulak dengan industri pertambangan minyak bumi, Langsa dengan industri perkebunan karet dan Kualasimpang dengan industri pertambangan minyak bumi, serta perkebunan karet dan kelapa sawit.

Menurut temuan dari studi kami, di antara kota-kota tersebut, hanya Langsa (*Onderafdeeling Langsa*) dan Kualasimpang (*Onderafdeeling Tamiang*) yang muncul sebagai kota baru sejak industri hadir di Aceh Timur pada dasawarsa pertama abad ke-20, dengan jumlah karyawan sekitar puluhan orang (wawancara bersama bapak Sugeng selaku Humas PTPN 1)". Temuan tersebut membuktikan bahwa Aceh Timur pernah menjadi daerah yang sangat penting. Sejak akhir abad ke-19, daerah Aceh Timur menjadi pusat perhatian kapitalis seiring

perkembangan situasi perekonomian kala itu. Pertama, di negeri Peureulak ditemukan potensi cadangan minyak bumi dan ulèëbalang setempat menyambut hangat kehadiran investor untuk mengeksploitasi minyak bumi di wilayah kekuasannya. Kedua, industri perkebunan tembakau di Deli berusaha dikembangkan ke daerah luar. Ketiga, situasi di daerah Aceh Timur sudah lebih kondusif daripada daerah lainnya. Situasi tersebut direspons oleh pemerintah kolonial dengan menyediakan daerah ekspansi kepada para investor. Alih fungsi bangunan Belanda di Langsa khususnya dilakukan untuk membuat sebuah revitalisasi terhadap perkembangan perkebunan PTPN 1 itu sendiri.

Pada awal kemerdekaan tahun 1945, maka peninggalan-peninggalan seperti bangunan pabrik milik Belanda jatuh ketangan pemerintah kita. Hal ini senada dengan bangunan yang ada di PTPN 1 Langsa, bangunan milik Belanda seperti rumah, pabrik, tower dan lain-lain otomatis menjadi milik pemerintah kita. Sebelum Indonesia merdeka, pemerintah Belanda yang telah menjajah Indonesia banyak membangun gedung-gedung besar yang hingga kini menjadi bangunan bersejarah.

Pada masa itu Pulau Sumatra khususnya daerah Aceh merupakan sebuah wilayah Transmigrasi yang diperuntukan bagi masyarakat Indonesia yang mau merubah nasib dengan cara bekerja di perusahaan perkebunan milik Belanda. Hal ini disampaikan oleh masyarakat yang bekerja di pensiunan perkebunan PTPN 1 Langsa yang berhasil diwawancarai, beliau menyatakan bahwa: “pada tahun 1950 beliau melakukan transmigrasi bersama-sama dengan rekannya yang berasal dari Pulau Jawa, hal ini ia lakukan untuk mendapatkan penghidupan yang layak dengan bekerja di pabrik PTPN I Kota Langsa, pertama sekali mereka diinapkan

di gudang-gudang bekas peninggalan pemerintah Hindia Belanda, masalahnya pada saat itu belum ada perumahan yang di peruntukan kepada para transmigran dari pulau Jawa tersebut (wawancara Sunar 15-11-2017)”.

Sungguh tidak diragukan lagi bahwa kesejahteraan Indonesia menurun, khususnya kesejahteraan masyarakat di pulau Sumatra. Banyak terjadi kelaparan serta semakin banyaknya pengangguran pada masa itu. Hal ini seperti yang dikatakan oleh H.C. Ricklefs (1991:234) yang menyatakan bahwasanya adalah: “ pihak Belanda telah meningkatkan anggaran belanja mereka untuk proyek-proyek kesehatan umum sebesar hampir sepuluh kali lipat antara tahun 1900 dan 1930. Akan tetapi, menghadapi kemiskinan yang mendalam dan penduduk di Sumatra yang banyak, hasilnya hanya terbatas”.

Pemerintah Belanda mendirikan berbagai bangunan-bangunan di hampir setiap perusahaan yang mereka miliki di seluruh Indonesia. Salah satu bangunan yang masih ada sampai saat ini seperti di perkebunan PTPN 1 Langsa. Pada masa pemerintahan Belanda, banyak sekali bangunan-bangunan yang mereka bangun untuk mendukung aktivitas mereka di tempat jajahannya. Salah satu bangunan yang masih ada sampai sekarang di perusahaan PTPN ini adalah bangunan rumah, gudang, pabrik dan lain-lain.

Sejak pengalihan aset dari pemerintah Belanda dan Jepang maka terjadi sedikit kemakmuran di Aceh khususnya. Hal ini disebabkan karena adanya para pekerja yang telah merasakan dampak dari pengalihan aset milik para penjajah kepada pemerintah Indonesia. Pada sarana yang terdapat di perkebunan-perkebunan, khususnya yang ada di perkebunan PTPN 1 dapat meningkatkan pendapatan penduduk terutama yang ada di Aceh Timur pada masa itu. Hal ini

sesuai dengan janji pemerintah kita yang akan mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia diawal kemerdekaan dengan mengambil seluruh aset penjajah di Indonesia untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Sejarah Perseroan diawali dengan proses pengambil alihan perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda oleh Pemerintah RI yang dikenal sebagai proses nasionalisasi perusahaan perkebunan asing menjadi Perseroan Perkebunan Negara (PPN). Muncul dan berkembangnya perusahaan Belanda di Langsa tidak terlepas dari pembangunan sarana untuk kemajuan industrialisasi mereka. Hal ini dikatakan oleh Siti Rakhma Mary Herwati dalam Jurnal Ilmiah Pertanian PPPM-STPN (2013:143) yang menyatakan bahwa: “Perusahaan-perusahaan perkebunan itu muncul, sejak berlakunya *Agrarische Wet* 1870. *Agrarische Wet* dan peraturan pemerintah pelaksanaanya (*Agrarische Besluit*) telah melapangkan jalan pengusaha Belanda dalam mendapatkan konsesi untuk menginvestasikan modal di sektor perkebunan dengan mendirikan berbagai bangunan yang mendukung industri”.

Agrarische Wet memberikan wewenang kepada Kerajaan Belanda untuk melepaskan hak penguasaan rakyat atas tanah-tanah yang digolongkan terlantar (*woeste gronden*) maupun tanah yang sedang digarap rakyat untuk kemudian memberikannya kepada pengusaha perkebunan dengan hak *erfpacht* yang memiliki jangka waktu. Pada masa itu banyak petani kehilangan tanah. Selama pemilikan tanah dan perusahaan yang dipegang oleh pemerintah Belanda, ternyata peninggalan-peninggalan bangunan-bangunan yang ada di PTPN tersebut merupakan bangunan bekas peninggalan pada masa Belanda. Mengingat sebelum diolah oleh pemerintah kita, perusahaan PTPN ini merupakan warisan dari pemerintah Belanda.

Industri perkebunan karet dimulai ketika pemerintah kolonial Belanda mendirikan *gouvernement caoutchouc onder-neming* (Perkebunan Karet Negara) di Langsa pada tahun 1907. Tujuannya adalah sebagai badan usaha milik negara dan perkebunan percontohan untuk menarik minat investor dari Sumatera Timur. Stimulasi tersebut direspons positif oleh para investor melalui pembukaan sejumlah perkebunan karet di seluruh Afdeeling Aceh Timur. Sementara itu prospek karet di pasar Eropa pada masa itu sangat menjanjikan keuntungan, terutama pada periode 1909-1911. Selain itu, para investor telah percaya terhadap potensi tanah di Aceh Timur yang diklaim oleh pemerintah sangat cocok untuk tanaman karet jenis *Hevea brasiliensis*. (Paramitha: *Historical Studies Journal*, 27 (1), 2017: 63:76) dengan judul *Industrialisasi Dan Eksistensi Kota Langsa Pada Era Kolonial, 1907-1942*).

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, maka seluruh aset Belanda dan Jepang yang ada di Indonesia termasuk perusahaan karet beserta bangunan yang terdapat didalamnya pada tahun 1945-1950 diambil alih oleh pemerintah Indonesia dengan nama Perkebunan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI). (*Jurnal PTPN 1 Persero Kebun Baru Langsa*). Pengambil alihan dari kebun swasta Belanda dan Jepang menjadi perusahaan perkebunan negara (PPN) kesatuan Aceh melalui PP nomor 142 tahun 1961, tidak hanya oleh pengusaha besar, bahkan satu dasawarsa berikutnya muncul animo dari petani Bumiputra untuk meniru kesuksesan perusahaan-perusahaan perkebunan besar dengan cara mereka sendiri.

Usaha perkebunan rakyat ini menjadi tren yang dikenal dengan istilah *Bevolking Srubber Cultuur* (Budidaya Karet Rakyat). Perkebunan-perkebunan

karet swasta mulai dibuka di Langsa pada tahun 1909. Pada akhir tahun 1917, di *Onder afdeeling* Langsa telah beroperasi sekitar 20 perusahaan swasta yang mengelola 28 onderneming. Pada tahun 1919, jumlahnya bertambah menjadi 44 onderneming dengan total luas penanaman 15.083 ha. Sebagian besar perusahaan perkebunan karet di Langsa tergabung dalam keanggotaan *AVROS (Algemeene Vereeniging van Rubberplanter ter Oostkust van Sumatra)* atau Asosiasi Pekebun Karet di Pantai Timur Sumatera (Paramitha: *Historical Studies Journal*, 27 (1), 2017: 63:76) dengan judul *Industrialisasi Dan Eksistensi Kota Langsa Pada Era Kolonial, 1907-1942*).

Alih fungsi bangunan-bangunan milik Belanda yang berada di PTPN 1 persero merupakan sebuah wujud penguasaan dari pemerintah Hindia Belanda dalam usaha untuk mendirikan berbagai macam bangunan yang berfungsi bagi mereka. Eksistensi pemerintah Belanda di Aceh pada masa itu dilakukan untuk memnuhi kebutuhan hidup mereka selama di Aceh. Adapun bangunan-bangunan yang pada masa itu dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda seperti pabrik, rumah, jembatan, gudang serta bangunan lain lagi yang berfungsi untuk kepentingan Belanda selama di Aceh. Hal ini dikatakan oleh Ahmad Mansur Suryanegara (2009:297) yang menyatakan bahwa: “ bangunan peninggalan sejarah terbiarkan tidak terpelihara atau sengaja dibiarkan roboh. Bahkan bangunannya pun dijadikan bahan pembuatan fondasi gedung-gedung kantor...”. hal inilah yang kemudian merusak nilai historis yang terdapat didalam bangunan bekas peninggalan Belanda khususnya yang ada di Kota Langsa, sehingga para generasi bangsa tidak dapat lagi melihat peninggalan tersebut yang telah berada di Kota Langsa, semoga pihak pemerintah Kota Langsa dapat memerhatikan ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sejarah singkat PTPN 1?
2. Apa perubahan yang terjadi pada bangunan Belanda di PTPN I Langsa?
3. Sejauh mana dampak perubahan bangunan terhadap PTPN I di masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah cara alih fungsi perkebunan Belanda ke pemerintah.
2. Untuk mengetahui apa perubahan yang terjadi pada bangunan Belanda di PTPN I Langsa.
3. Untuk mengetahui sejauh mana dampak perubahan bangunan terhadap PTPN I di masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Mengetahui sejauh mana manfaat bangunan warisan Belanda di PTPN.
2. Mengetahui bagaimana alih fungsi bangunan-bangunan peninggalan Belanda tersebut sampai saat ini di PTPN 1.
3. Mengetahui perkembangan bangunan-bangunan PTPN I dari masa Belanda sampai masa sekarang.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Pembatasan Ruang Lingkup Pembahasan diperlukan dalam penulisan, agar pembahasannya tidak terlalu luas. Disamping itu juga, pembatasan Ruang Lingkup Pembahasan akan memberikan kemudahan bagi pembaca.

1. Scope temporal penulisan ini adalah dimulai dari tahun 1945 yaitu pada awal kemerdekaan Indonesia, dimana ketika itu seluruh aset yang dimiliki Belanda menjadi milik bangsa Indonesia.
2. Scope Spatialnya adalah pengalihan fungsi bangunan Belanda yang ada di PTPN I yang sampai saat ini masih ada.
3. Scope Tematikal dalam penulisan ini adalah hanya membahas pada peninggalan bangunan-bangunan Belanda yang masih terpakai di PTPN.